



EVALUASI 4 TAHUN SBY-BOEDIONO: STAGNASI KEPUASAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAN DPR

**TEMUAN SURVEI NASIONAL
13-23 SEPTEMBER 2013**



Pol-Tracking Institute

Jakarta, 20 Oktober 2012

Jl. Pangrango 3A, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan-12980
Telp. +6221-83701545, +6221-83794995, Faks.+6221-83795016
Website: www.poltracking.com, Email: contact@poltracking.com



2

Tema

Evaluasi 4 Tahun SBY-Boediono: Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR



Latar Belakang

3

- Skema konstitusi Indonesia menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hingga memegang kendali penuh proses kebijakan dan sekaligus politik di dalamnya.
- Selain itu, Konstitusi menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai badan legislatif yang berasal dari partai politik untuk mengawasi kinerja eksekutif dalam menjalankan proses pemerintahannya. Di titik ini kinerja presiden dan DPR RI menjadi penting untuk dibaca melalui kaca mata publik.
- Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan SBY-Boediono, serta kinerja lembaga legislatif (DPR RI) periode 2009-2014 dapat menjadi referensi untuk membaca perilaku pemilih dalam melakukan pilihannya pada pemilu 2014 yang akan datang
- Akhirnya, membaca kinerja Pemerintahan SBY-Boediono, dan kinerja DPR RI periode 2009-2014 untuk menentukan referensi pergerakan perilaku pemilih menggunakan metode survei menjadi penting untuk dilakukan, dan disampaikan kepada khalayak. Hasil survei tersebut dapat menjadi masukan amat penting bagi Pemerintah maupun DPR sebagai bahan evaluasi sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja.



Pengukuran

4

Pengukuran pendapat dan sikap publik dalam survei ini mencakup hal-hal berikut:

- ❑ Pertanyaan tertutup : Bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap kinerja Pemerintahan SBY-Boediono? Apakah sangat puas, cukup puas, kurang puas, sangat tidak puas, atau tidak tahu?
- ❑ Kepuasan terhadap kinerja pemerintahan pada bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan kepentingan-kepentingan publik
- ❑ Persepsi terhadap persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan dasar publik secara umum.
- ❑ Kualitas kinerja menteri-mentri dari partai politik yang tergabung dalam koalisi Kabinet Indonesia Bersatu II
- ❑ Pertanyaan tertutup : Bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap kinerja DPR RI 2009-2014? Apakah puas, tidak puas, atau tidak tahu? kinerja lembaga legislatif dalam melakukan fungsi-fungsinya pada periode 2009-2014



Metodologi

5

- Populasi Survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat wawancara.
- Jumlah sampel dalam survei ini adalah 2010 responden dengan margin error +/- 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%.
- Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa atau kelurahan.
- Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan (*spot check*) sekitar 20-30% dari total data masuk, untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. Dalam proses penjaminan metodologi dan akurasi data tidak ditemukan kesalahan berarti.



Metodologi

6

- Kendali mutu survei adalah pewawancara lapangan minimal mahasiswa atau sederajat dan mendapatkan pelatihan (workshop) di setiap pelaksanaan survei.
- Survei (pengumpulan data/wawancara) dilaksanakan pada 13-23 September 2013 secara serentak dan nasional di 33 provinsi.
- Validasi data dilakukan dengan membandingkan karakteristik demografis dari sampel yang diperoleh dari survei dengan populasi yang diperoleh melalui data sensus (BPS) terakhir



Prosedur Penarikan Sample

7

- Metode penarikan sampel adalah *multi-stage random sampling* dengan stratifikasi dan tingkatan cluster sebagai berikut:
- Stratifikasi pertama: populasi dikelompokkan menurut provinsi, dan masing-masing provinsi diberi kuota sesuai dengan total pemilih di masing-masing provinsi.
- Stratifikasi kedua: populasi dikelompokkan menurut jenis kelamin: 50% laki-laki, dan 50% perempuan.
- Stratifikasi ketiga: populasi dikelompokkan ke dalam kategori yang tinggal di pedesaan (desa, 60%) dan perkotaan (kelurahan, 40%).
- Cluster 1: Di masing-masing provinsi (33 provinsi dengan data BPS terakhir) ditentukan jumlah pemilih sesuai dengan populasi pemilih masing-masing provinsi. Atas dasar ini, dipilih desa dan kelurahan secara random sebagai *primary sampling unit*.
- Jumlah desa/kelurahan tergantung persentase jumlah pemilih di masing-masing provinsi. Ditetapkan untuk setiap desa dipilih 10 pemilih (5 laki-laki, dan 5 perempuan) secara random. Proporsi jumlah desa di setiap provinsi terlihat di dalam peta survei dalam laporan presentasi ini.

Lanjutan...



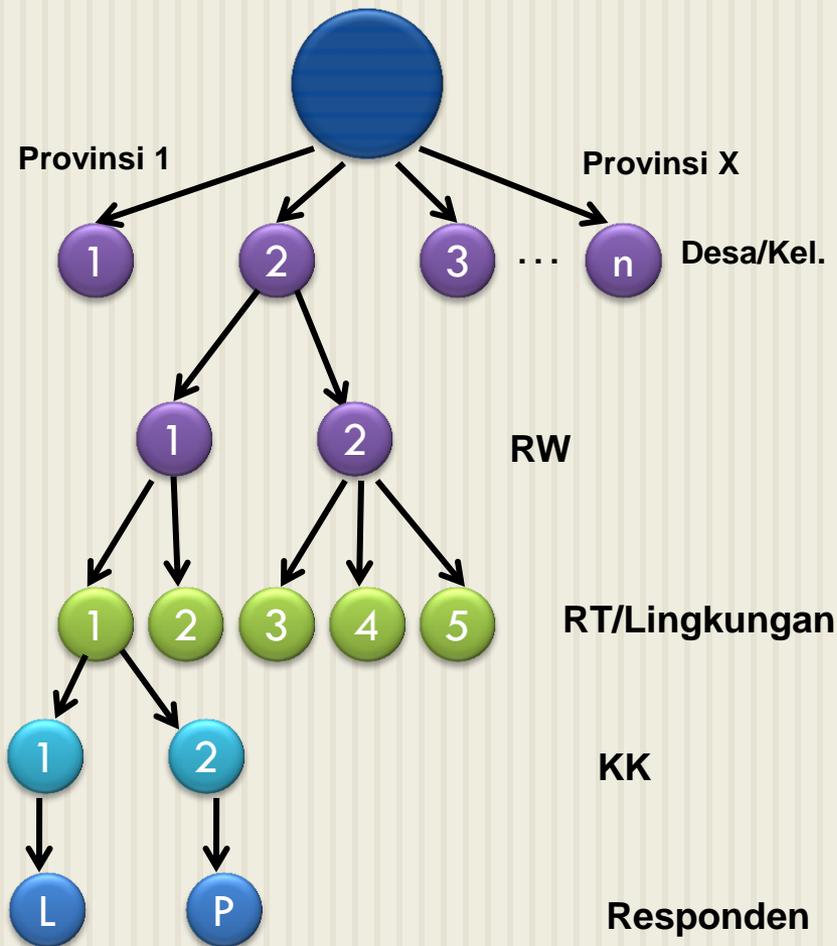
- Cluster 2: Di masing-masing desa terpilih, kemudian didaftar populasi RT atau yang setingkat. Kemudian dipilih secara random 5 RT dengan ketentuan di masing-masing RT akan dipilih secara random dua keluarga.

- Cluster 3: Di masing-masing RT terpilih, populasi keluarga didaftar, kemudian dipilih secara random 2 keluarga.

- Di masing-masing keluarga terpilih, kemudian didaftar seluruh anggota keluarga yang punya hak pilih laki-laki atau perempuan, dan kemudian dipilih secara random siapa yang akan menjadi responden di antara mereka.

- Bila pada keluarga pertama yang dipilih adalah responden perempuan, maka pada keluarga berikutnya harus laki-laki.

Flowchart Penarikan Sampel



- Menggunakan Teknik Multistage Random Sampling: Populasi desa/kelurahan tingkat nasional.
- Desa/kelurahan di tingkat provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional.
- Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random.
- Di masing-masing RT/lingkungan dipilih secara random dua KK.
- Di KK terpilih dipilih secara random satu orang dewasa laki-laki/perempuan yang berhak memilih



Temuan Survei



Profil Demografi Responden (%) (Validasi Sampel)

Proporsi Gender dan Penduduk (%)

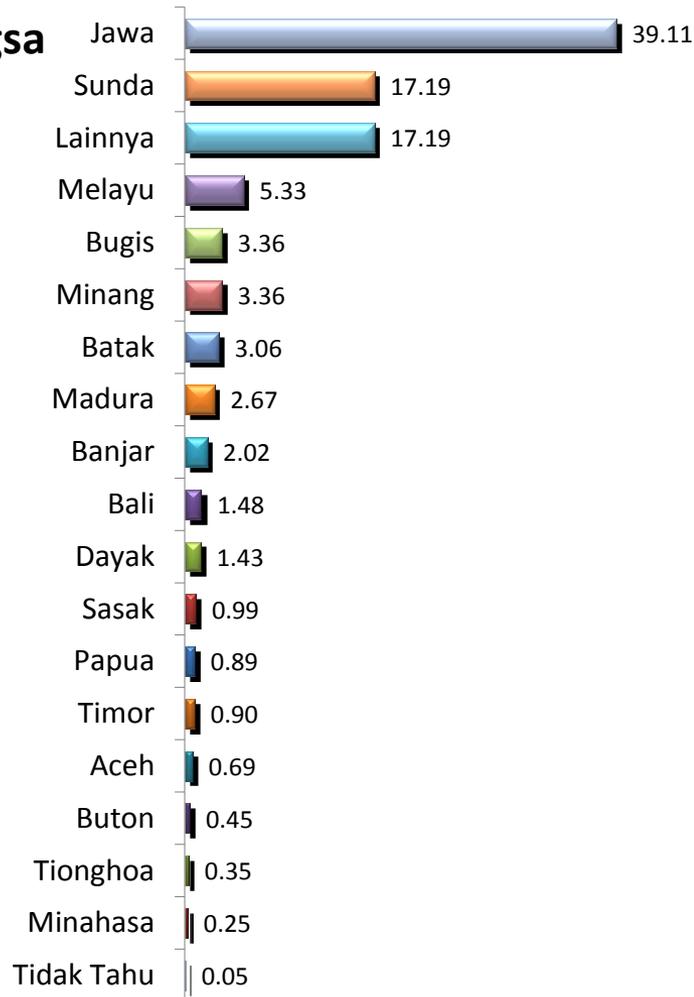


KATEGORI	SAMPEL	BPS 2010
GENDER		
LAKI-LAKI	50.0	50.0
PEREMPUAN	50.0	50.0
DESA - KOTA		
DESA	60.00	59.4
KOTA	40.00	40.6

Etnis (Suku)



Suku Bangsa

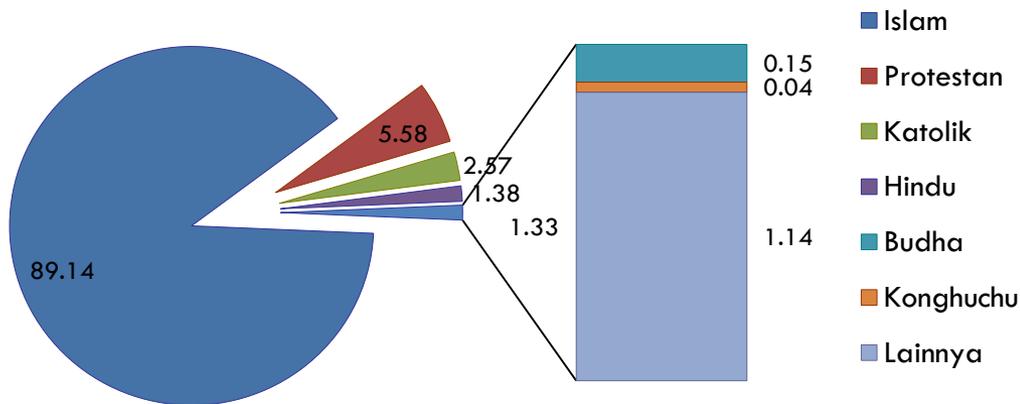


KATEGORI	SAMPEL	BPS 2010
JAWA	39.11	40.22
SUNDA	17.19	15.5
MELAYU	5.33	2.27
BUGIS	3.36	2.69
MINANGKABAU	3.26	2.73
BATAK	3.06	3.58
MADURA	2.67	3.03
BANJAR	2.02	1.74
BALI	1.48	1.67
DAYAK	1.43	1.27
SASAK	0.99	1.34
PAPUA	0.89	1.14
ACEH	0.69	1.73
TIONGHOA	0.35	1.2
MINAHASA	0.25%	0.52
LAINNYA	17.19	19.37

Agama



Agama Responden



AGAMA	SAMPEL	BPS
ISLAM	89.14	87.18
PROTESTAN	5.58	6.96
KATOLIK	2.57	2.90
HINDU	1.38	1.69
BUDHA	0.15	0.72
KONG HU CU	0.04	0.05
LAINNYA	1.14	0.51

Perbandingan Demografi Sampel dan Penduduk Per Provinsi



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAHAN SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

16

KATEGORI	SAMPEL	BPS 2010
Aceh	1.99%	1.90%
Bali	1.49%	1.65%
Banten	4.48%	4.52%
Bengkulu	1.00%	0.73%
Daerah Istimewa Yogyakarta	1.49%	1.47%
DKI Jakarta	2.99%	3.20%
Gorontalo	0.50%	0.44%
Jambi	1.49%	1.31%
Jawa Barat	18.41%	18.26%
Jawa Tengah	13.93%	13.75%
Jawa Timur	15.92%	15.91%
Kalimantan Barat	1.99%	1.86%

KATEGORI	SAMPEL	BPS 2010
Kalimantan Selatan	1.49%	1.54%
Kalimantan Tengah	1.00%	0.94%
Kalimantan Timur	1.49%	1.51%
Kep. Bangka Belitung	0.50%	0.52%
Kepulauan Riau	0.50%	0.72%
Lampung	2.99%	3.22%
Maluku	0.50%	0.65%
Maluku Utara	0.50%	0.44%
Nusa Tenggara Barat	1.99%	1.91%
Nusa Tenggara Timur	1.99%	1.99%
Papua	1.00%	1.21%
Papua Barat	0.50%	0.32%

Lanjutan...



KATEGORI	SAMPEL	BPS 2010
Riau	2.49%	2.38%
Sulawesi Barat	0.50%	0.49%
Sulawesi Selatan	3.48%	3.41%
Sulawesi Tengah	1.00%	1.12%
Sulawesi Tenggara	1.00%	0.95%
Sulawesi Utara	1.00%	0.96%
Sumatera Barat	1.99%	2.06%
Sumatera Selatan	2.99%	3.16%
Sumatera Utara	5.47%	5.51%



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO

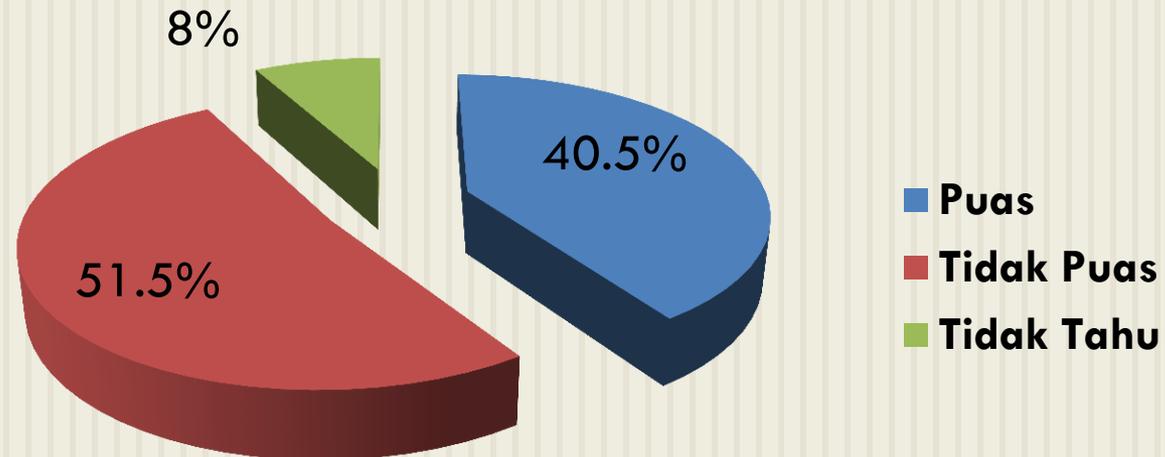
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAHAN SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

19



Analisis:

- Hanya 40.5% masyarakat yang menyatakan puas dengan pemerintahan SBY-Boediono dengan rincian 35,1% 'cukup puas' dan 4,4% 'sangat puas'. Sedangkan 51.5 % lainnya menyatakan tidak puas, dengan rincian 41.5% merasa 'kurang puas' dan 10% 'sangat tidak puas'. Sisanya, 8% menyatakan 'tidak tahu'. Tingkat kepuasan publik berada di bawah 50% menunjukkan kinerja pemerintahan yang stagnan.
- Di sisi yang lain, bila melihat komposisi kabinet yang diisi 19 kursi atau 55% menteri dari Parpol, ketidakpuasan masyarakat ini menjadi wajar, karena para menteri lebih fokus kepada partai untuk menghadapi Pemilu 2014. Hal ini juga diperkuat dengan hadirnya 4 ketua umum partai yakni, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat. Selain ketua umum partai, terdapat 10 orang menteri yang turut maju dalam kontestasi Pemilu 2014 sebagai calon anggota legislatif.

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO

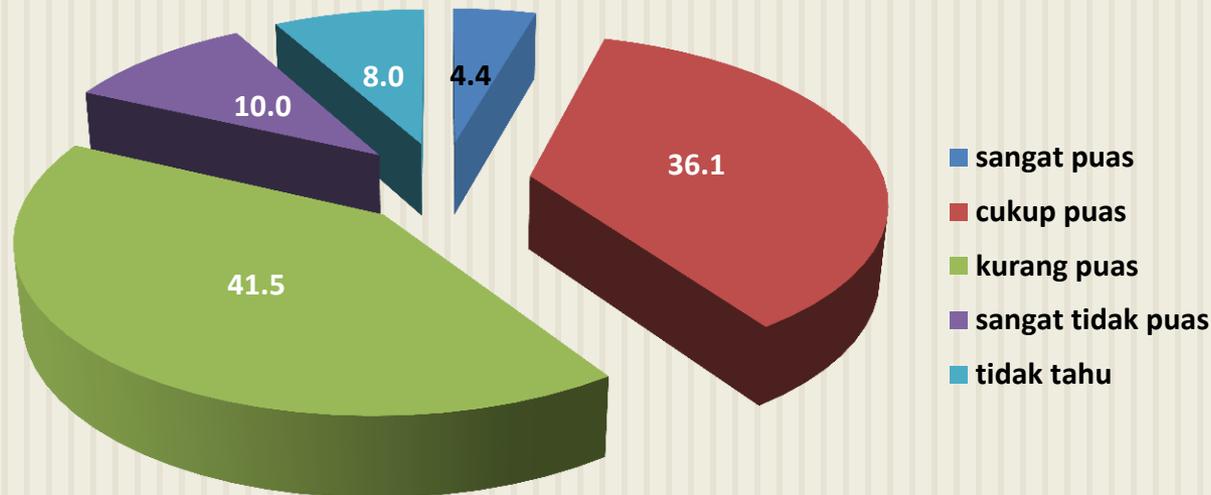


HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAHAN SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

20

Kepuasan Kinerja Sby - Budiono



Analisis:

Data di atas menunjukkan hanya 4,4% masyarakat yang menyatakan 'sangat puas' dan 36,1% 'cukup puas'. Jika kategori 'puas' kita hitung 'cukup puas' dan 'sangat puas' maka hanya ada 40,5% masyarakat yang menyatakan puas dengan pemerintahan SBY-Boediono, sedangkan lebih dari 50%, tepatnya 51,5% masyarakat menyatakan tidak puas dengan rincian 41,5% merasa kurang puas, 10% sangat tidak puas, dan 8% tidak tahu. Tingkat kepuasan publik yang berada di angka 40% atau di bawah 50% menunjukkan kinerja pemerintahan yang stagnan karena efek kebijakan yang belum terdistribusi dengan baik dan penyelesaian berbagai problem bangsa yang tidak efektif.

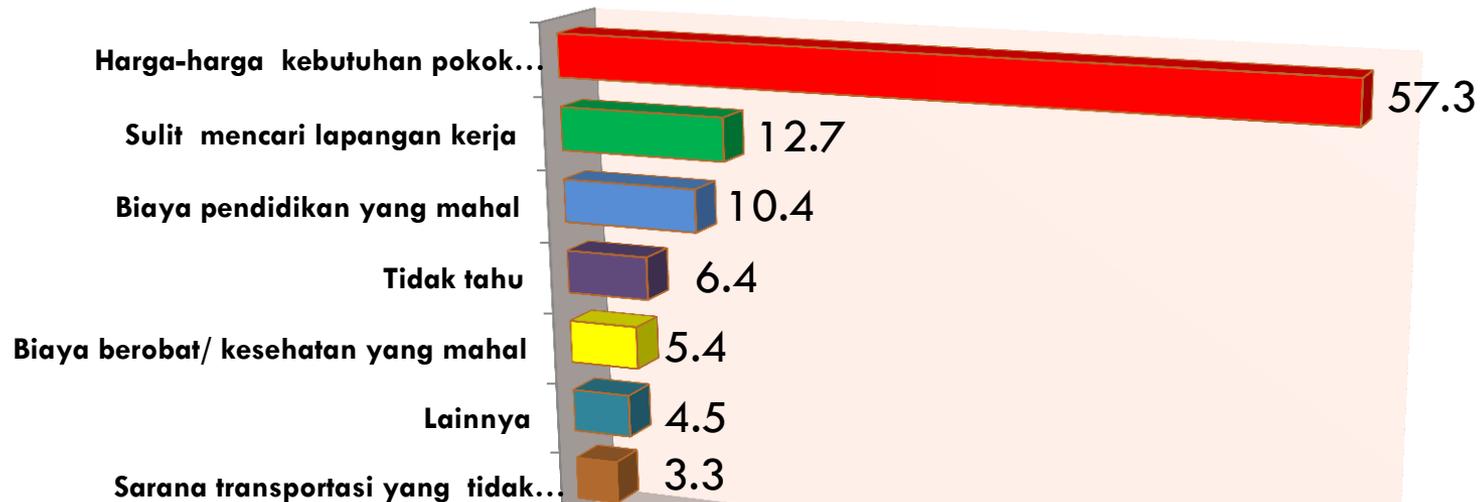
PERMASALAHAN PALING POKOK YANG TENGAH DIHADAPI MASYARAKAT



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
Pemerintahan SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

21



Analisis:

1. Grafik ini memperlihatkan permasalahan pemerintahan SBY-Boediono. Permasalahan Harga kebutuhan pokok yang mahal merupakan permasalahan utama yang dianggap responden paling dirasakan (57.3%). Sisanya 12.7% responden menganggap sulitnya mencari lapangan kerja menjadi permasalahan selanjutnya mahal biaya pendidikan (10.4%)
2. Mahalnya harga kebutuhan pokok ini terjadi sebagai imbas dari ketidakjelasan kenaikan harga BBM, walaupun akhirnya pada tanggal 23 Juni 2013 telah berlaku efektif. Selain itu, krisis ekonomi dunia yang belum berakhir, turut mempengaruhi pasar dan perekonomian secara nasional
3. Efek dari mahalnya kebutuhan pokok dan sulitnya mencari lapangan kerja, mempengaruhi daya beli masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan maupun fasilitas publik lainnya

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP 3 HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN UMUM



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
Pemerintahan SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

22



Analisis:

Dari tiga permasalahan publik di atas, hampir semua masyarakat menilai 'mahal' terhadap harga kebutuhan bahan pokok (91.0%). Sementara itu, biaya berobat dan pendidikan mempunyai interval penilaian publik—antara 'mahal' dan 'murah'—cenderung lebih kecil dibandingkan harga kebutuhan pokok. Artinya, harga bahan pokok sebagai produk kebijakan ekonomi akan sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono di bidang ekonomi.

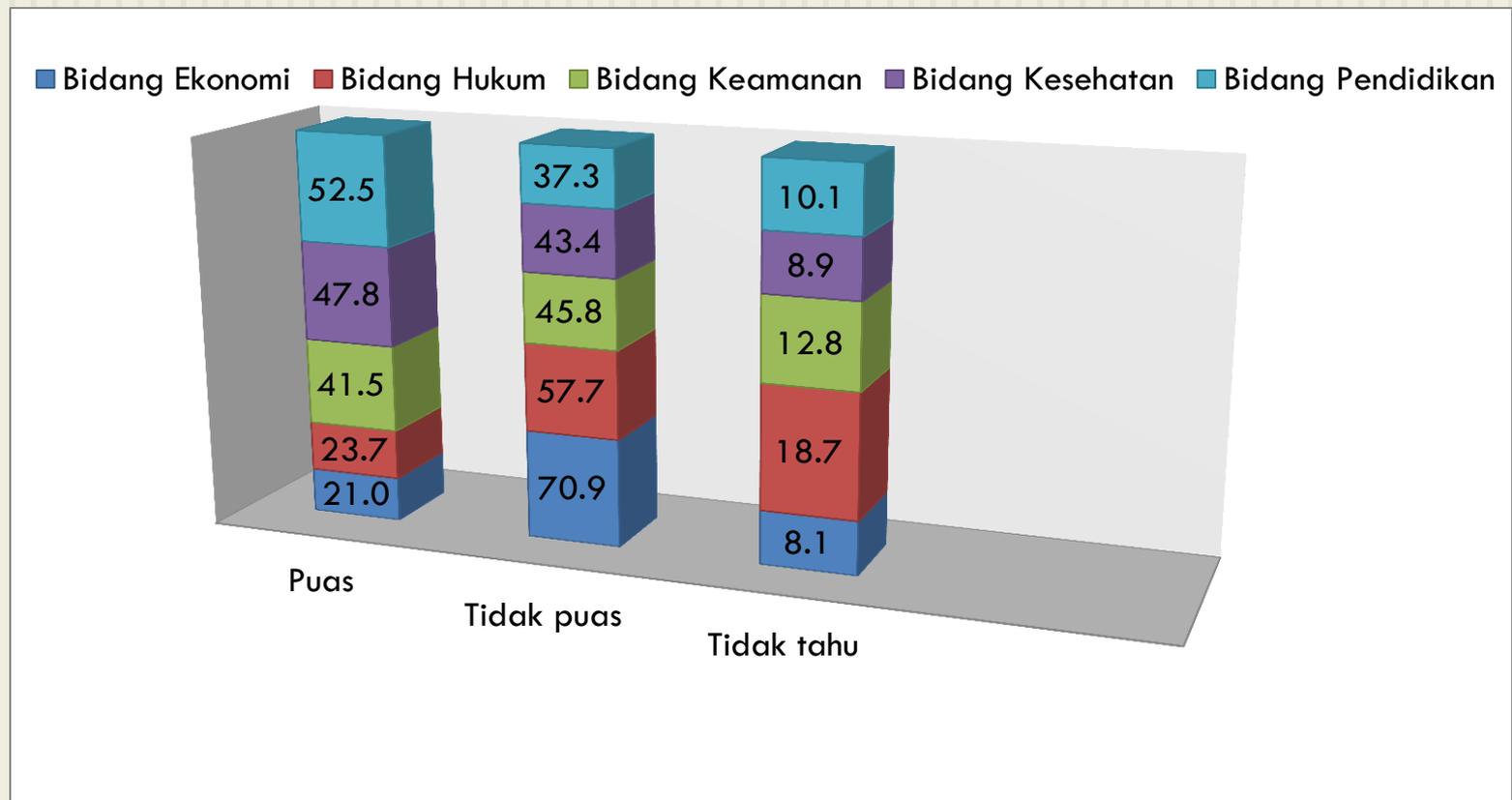
PERBANDINGAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP BEBERAPA BIDANG PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAHAN SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

23



Analisis:

Tingkat ketidakpuasan masyarakat ditunjukkan di bidang ekonomi, yakni sebesar 70.9%. Disusul bidang hukum (57.7%), bidang keamanan (45.8%), bidang kesehatan (43.4%), dan bidang pendidikan (37.3%). Kepuasan masyarakat terlihat paling baik di bidang Pendidikan (52.5%), dibanding bidang lainnya Kesehatan (47.8%), Keamanan (41.5%), Hukum (23.7%), dan Ekonomi (21.0%).

Singkatnya, bidang ekonomi dan bidang hukum adalah bidang kebijakan pemerintahan SBY-Boediono yang mendapatkan penilaian 'tidak puas' di atas 50%. Artinya, pemerintahan KIB II dianggap lemah oleh publik terutama di dua bidang ini, walaupun tiga bidang lainnya juga belum cukup memuaskan publik.

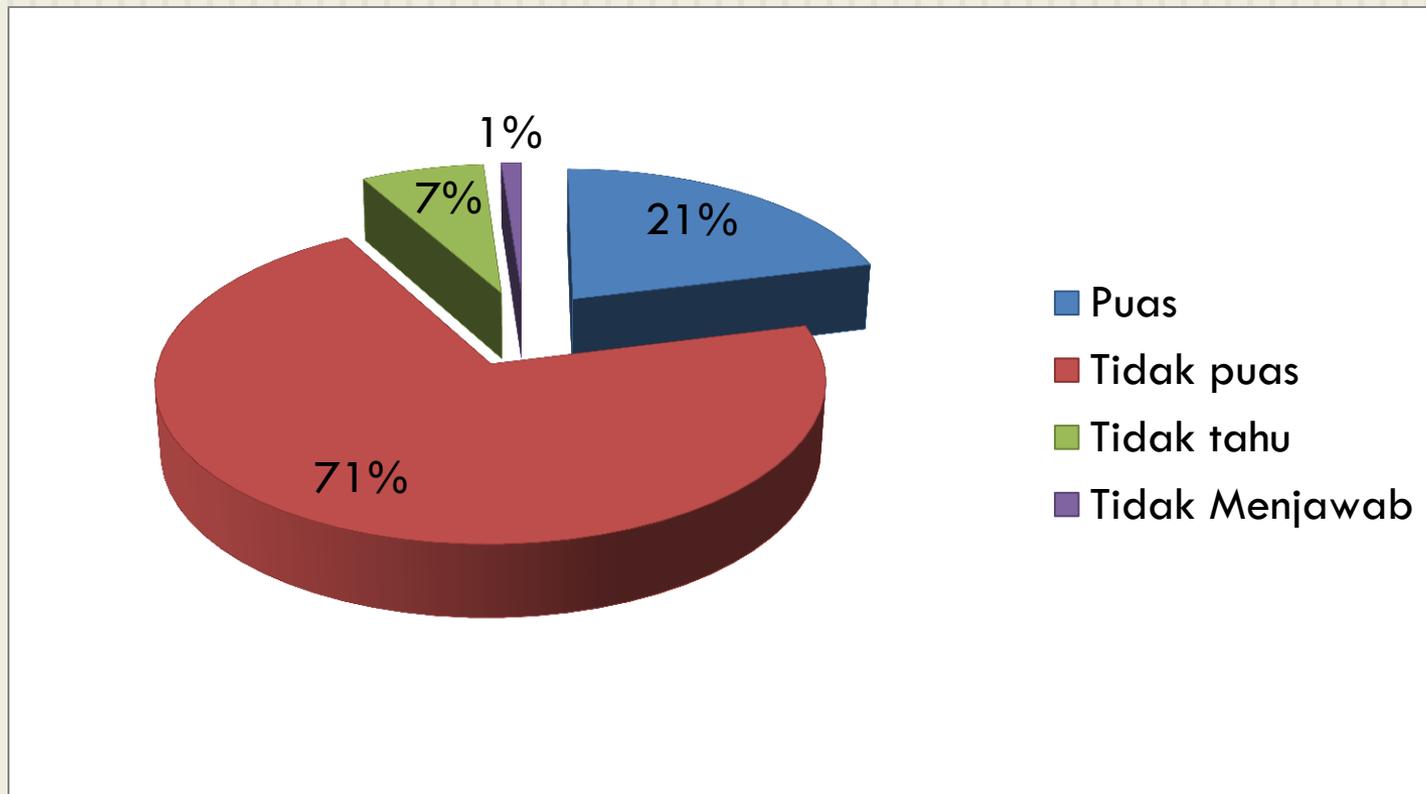
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO PADA BIDANG EKONOMI



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAHAN SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

24



Ketidakpuasan di bidang ekonomi tergambar jelas dari persepsi masyarakat terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal dalam beberapa bulan terakhir ini. Sebagai misal, persepsi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok sangat tinggi menyatakan mahal (91%) sehingga persepsi terhadap harga kebutuhan pokok yang mahal ini memicu buruknya persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono di Bidang Ekonomi.

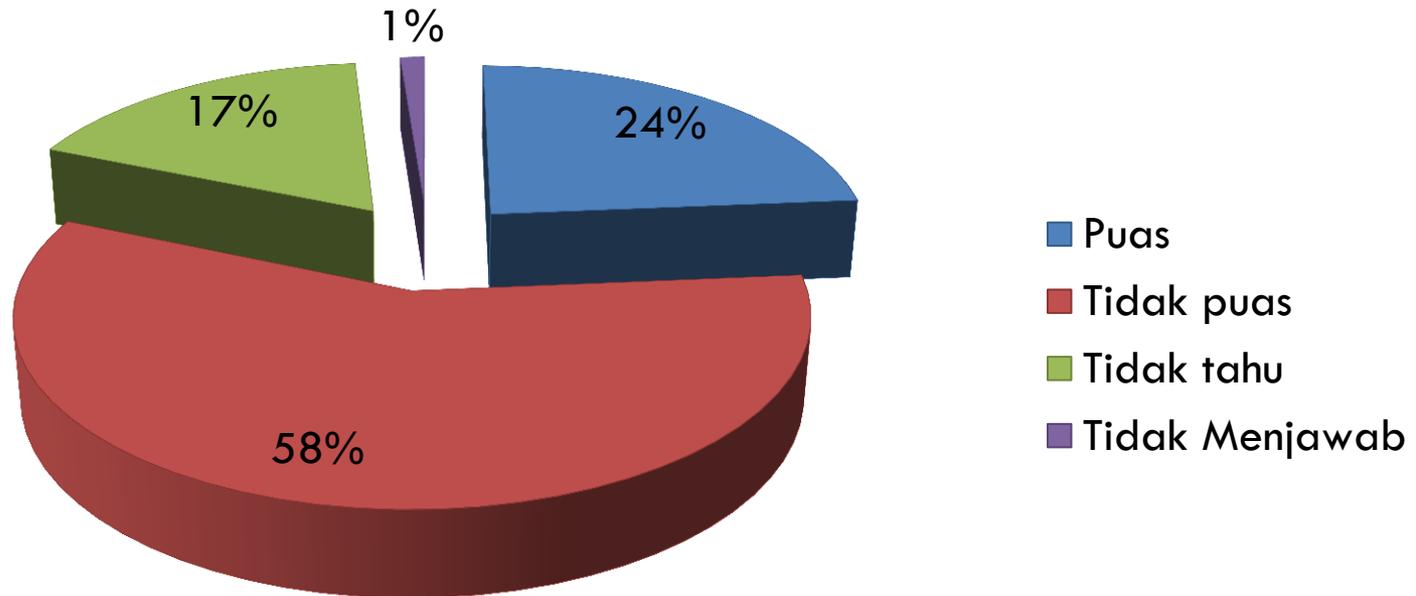
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO PADA BIDANG HUKUM



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAHAN SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

25



Sementara di bidang hukum, masyarakat belum melihat hadirnya koordinasi sistematis dan sinergis antara Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK dalam menuntaskan berbagai mega skandal korupsi. Isu korupsi yang melibatkan pejabat negara dan terus diputar media menjadi domain paling krusial yang membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan di bidang hukum.

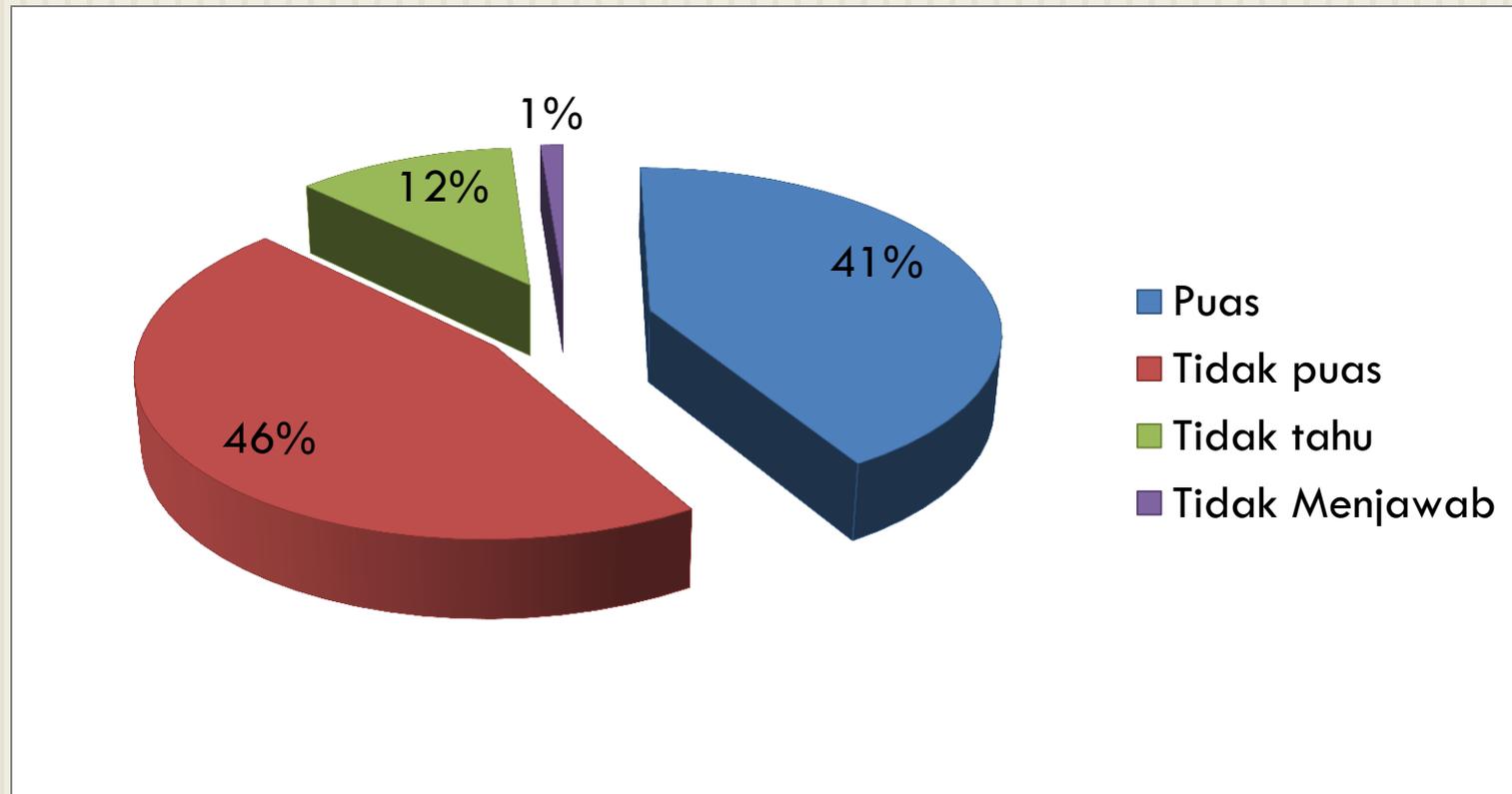
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO PADA BIDANG KEAMANAN



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAHAN SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

26



Di bidang keamanan, ada beberapa hal bisa mempengaruhi persepsi publik. Pertama, masyarakat akhir-akhir ini cukup resah akibat banyak terbunuhnya para anggota polisi, hal ini penting karena polisi sebagai simbol penjamin keamanan seolah jatuh dan lumpuh. Kedua, tingkat kriminalitas yang terjadi di beberapa daerah dirasakan masyarakat masih tinggi.

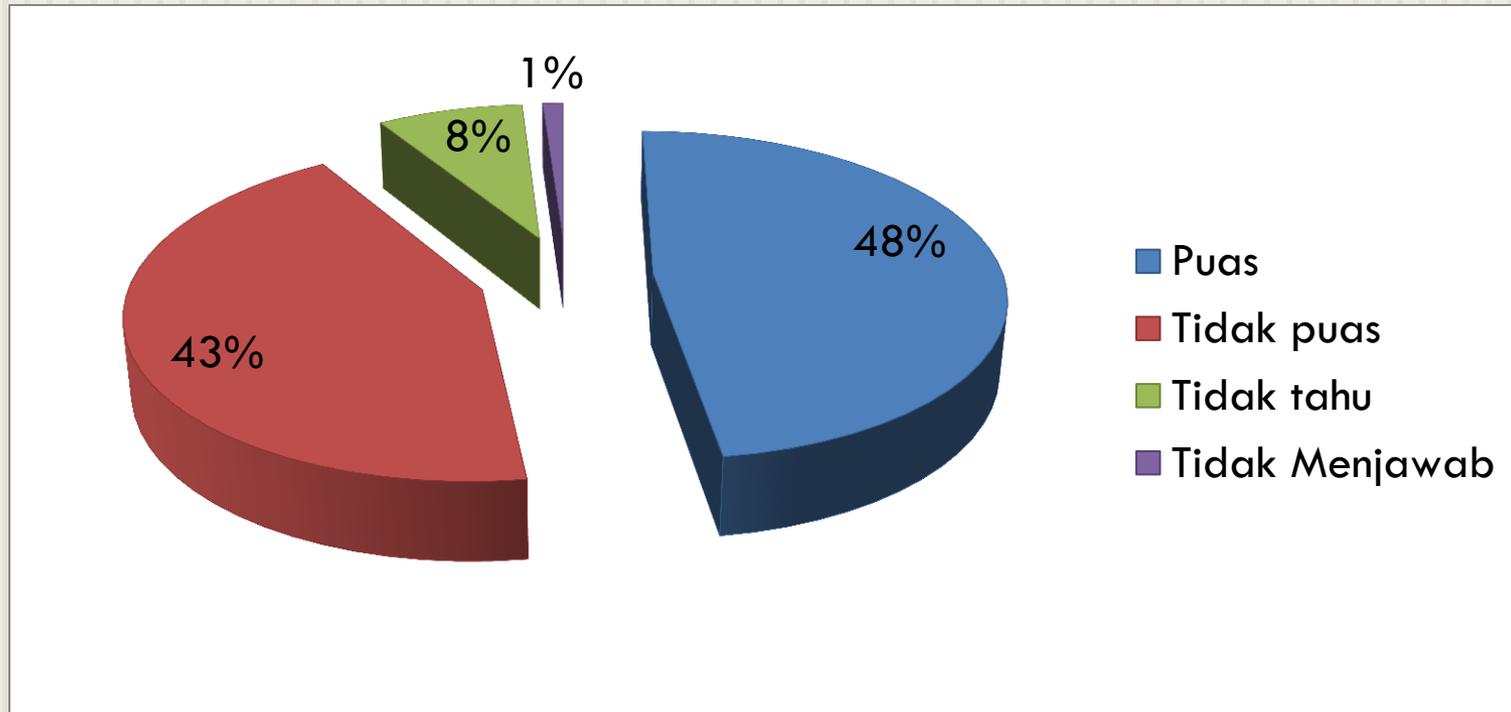
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO PADA BIDANG KESEHATAN



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAHAN SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

27



Di bidang kesehatan, ada dua isu yang berpengaruh terhadap persepsi publik, yaitu soal biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan. Walaupun dalam beberapa kasus, persepsi publik di bidang ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan daerah.

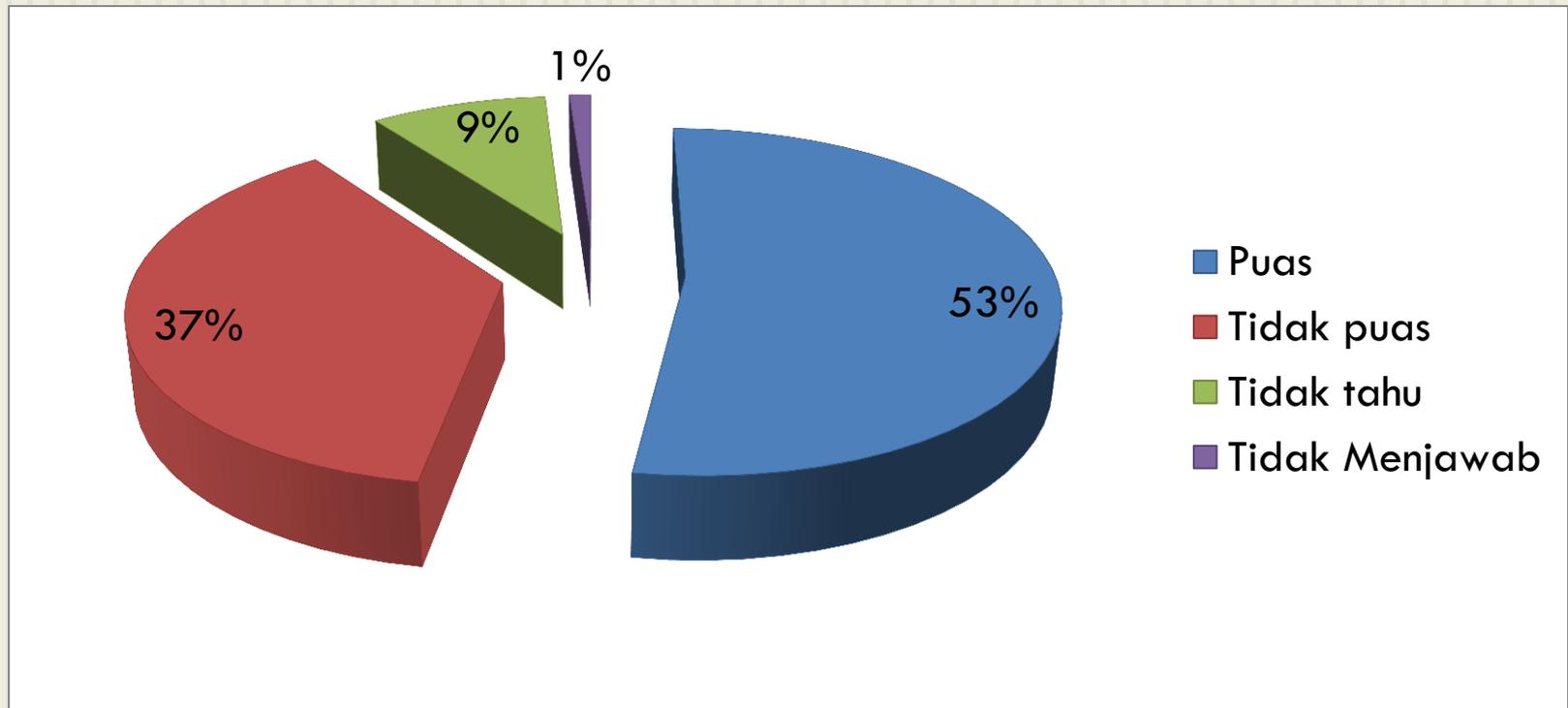
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO PADA **BIDANG PENDIDIKAN**



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAHAN SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

28



Tingkat kepuasan di bidang pendidikan yang berada di atas angka 53% disebabkan oleh semakin meningkatnya insentif yang diberikan kepada para pendidik maupun besarnya anggaran pendidikan dalam membantu para peserta didik yang kurang mampu

CROSS TAB DEMOGRAFI DAN KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN KINERJA PEMERINTAH



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAHAN SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

29

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH BERDASARKAN **JENIS KELAMIN**

	SAMPEL	BPS	PUAS	TIDAK PUAS	TIDAK TAHU / TIDAK JAWAB
LAKI-LAKI	50%	50%	40.49%	54.29%	5.22%
PEREMPUAN	50%	50%	40.50%	48.81%	10.69%

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH BERDASARKAN **DESA/KOTA**

	SAMPEL	BPS	PUAS	TIDAK PUAS	TIDAK TAHU
DESA	60%	59.40%	43.74%	48.93%	7.34%
KOTA	40%	40.6	32.92%	58.80%	8.27%

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH BERDASARKAN **PENDAPATAN**

	PUAS	TIDAK PUAS	TIDAK TAHU/ TIDAK JAWAB
KURANG DARI Rp. 400.000	41.54%	50.51%	7.95%
Rp 400.000 - Rp. 999.000	43.64%	51.94%	4.42%
Rp 1.000.000 - Rp. 1.499.000	44.04%	50.69%	5.26%
Rp. 1.500.000 - Rp. 1.999.000	25.32%	45.57%	5.49%
LEBIH DARI Rp. 2.000.000	41.35%	53.59%	5.06%
TIDAK TAHU / TIDAK JAWAB	35.52%	46.55%	17.93%



LANJUTAN... (AGAMA)

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH BERDASARKAN **AGAMA**

	SAMPEL	BPS	PUAS	TIDAK PUAS	TIDAK TAHU
ISLAM	89.14%	87.18	39.61%	52.08%	8.31%
PROTESTAN	5.58%	6.96	49.56%	46.90%	3.54%
KATOLIK	2.57%	2.9	61.54%	38.46%	0.00%
HINDU	1.38%	1.69	39.29%	60.71%	0.00%
BUDHA	0.15%	0.72	66.67%	33.33%	0.00%
KONG HU CU	0.04%	0.05	0.00%	100.00%	0.00%
LAINNYA	1.14%	0.51	17.39%	52.17%	30.43%



LANJUTAN... (SUKU)

31

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH BERDASARKAN SUKU

KATEGORI	SAMPEL	BPS 2010	PUAS	TIDAK PUAS	TIDAK TAHU
JAWA	39.11	40.22	37.75%	8.59%	8.59%
SUNDA	17.19	15.5	38.69%	5.95%	5.95%
MELAYU	5.33	2.27	38.89%	7.41%	7.41%
BUGIS	3.36	2.69	44.12%	8.82%	8.82%
MINANGKABAU	3.26	2.73	40.91%	3.03%	3.03%
BATAK	3.06	3.58	25.81%	1.61%	1.61%
MADURA	2.67	3.03	25.93%	7.41%	7.41%
BANJAR	2.02	1.74	41.46%	31.71%	31.71%
BALI	1.48	1.67	40.00%	0.00%	0.00%
DAYAK	1.43	1.27	68.97%	6.90%	6.90%
SASAK	0.99	1.34	50.00%	5.00%	5.00%
PAPUA	0.89	1.14	94.44%	0.00%	0.00%
ACEH	0.69	1.73	21.43%	7.14%	7.14%
TIONGHOA	0.35	1.2	57.14%	0.00%	0.00%
MINAHASA	0.25	0.52	100.00%	0,00%	0.00%
LAINNYA	17.19	19.37	44.83%	9.77%	9.77%



LANJUTAN...(PROVINSI)

32

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH BERDASARKAN **PROVINSI**

PROVINSI	SAMPEL	BPS 2010	PUAS	TIDAK PUAS	TIDAK TAHU / TIDAK JAWAB
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.99%	1.90%	42.50%	57.50%	0.00%
BANGKA BELITUNG	0.50%	0.52%	20.00%	70.00%	10.00%
DKI JAKARTA	2.99%	3.20%	50.00%	48.33%	1.67%
JAWA BARAT	18.41%	18.26%	40.81%	53.24%	5.95%
JAWA TENGAH	13.93%	13.75%	35.44%	52.98%	11.58%
DI YOGYAKARTA	1.49%	1.47%	20.00%	80.00%	0.00%
JAWA TIMUR	15.92%	15.91%	39.69%	51.25%	9.06%
BANTEN	4.48%	4.52%	21.11%	62.22%	16.67%
BALI	1.49%	1.65%	50.00%	50.00%	0.00%
NUSA TENGGARA BARAT	1.99%	1.91%	30.00%	62.50%	7.50%
NUSA TENGGARA TIMUR	1.99%	1.99%	70.00%	30.00%	0.00%
SUMATERA UTARA	1.00%	0.96%	25.45%	72.73%	1.82%
KALIMANTAN BARAT	1.99%	1.86%	46.15%	33.33%	20.51%
KALIMANTAN TENGAH	1.00%	0.94%	75.00%	15,00%	10.00%
KALIMANTAN SELATAN	1.49%	1.54%	32.50%	32.50%	35.00%
KALIMANTAN TIMUR	1.49%	1.51%	40.00%	50.00%	10.00%



LANJUTAN...(PROVINSI)

PROVINSI	SAMPEL	BPS 2010	PUAS	TIDAK PUAS	TIDAK TAHU / TIDAK JAWAB
SULAWESI UTARA	5.47%	5.51%	80.00%	15.00%	5.00%
SULAWESI TENGAH	1.00%	1.12%	35.00%	20.00%	45.00%
SULAWESI SELATAN	3.48%	3.41%	61.43%	35.71%	2.86%
SULAWESI BARAT	0.50%	0.49%	50.00%	50.00%	0.00%
SULAWESI TENGGARA	1.00%	0.95%	30.00%	65.00%	5.00%
GORONTALO	0.50%	0.44%	80.00%	10.00%	10.00%
SUMATERA BARAT	1.99%	2.06%	47.50%	45.00%	7.50%
MALUKU	0.50%	0.65%	45.45%	54.55%	0.00%
MALUKU UTARA	0.50%	0.44%	33.33%	55.56%	11.11%
PAPUA	1.00%	1.21%	95.00%	5.00%	0.00%
PAPUA BARAT	0.50%	0.32%	60.00%	40.00%	0.00%
RIAU	2.49%	2.38%	34.00%	64.00%	2.00%
KEPULAUAN RIAU	0.50%	0.72%	90.00%	10.00%	0.00%
JAMBI	1.49%	1.31%	40.00%	50.00%	10.00%
SUMATERA SELATAN	2.99%	3.16%	45.00%	48.33%	6.67%
BENGKULU	1.00%	0.73%	40.00%	60.00%	0.00%
LAMPUNG	2.99%	3.22%	0.27%	0.27%	0.27%



HASIL SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA **MENTERI PARTAI** **POLITIK KIB II**

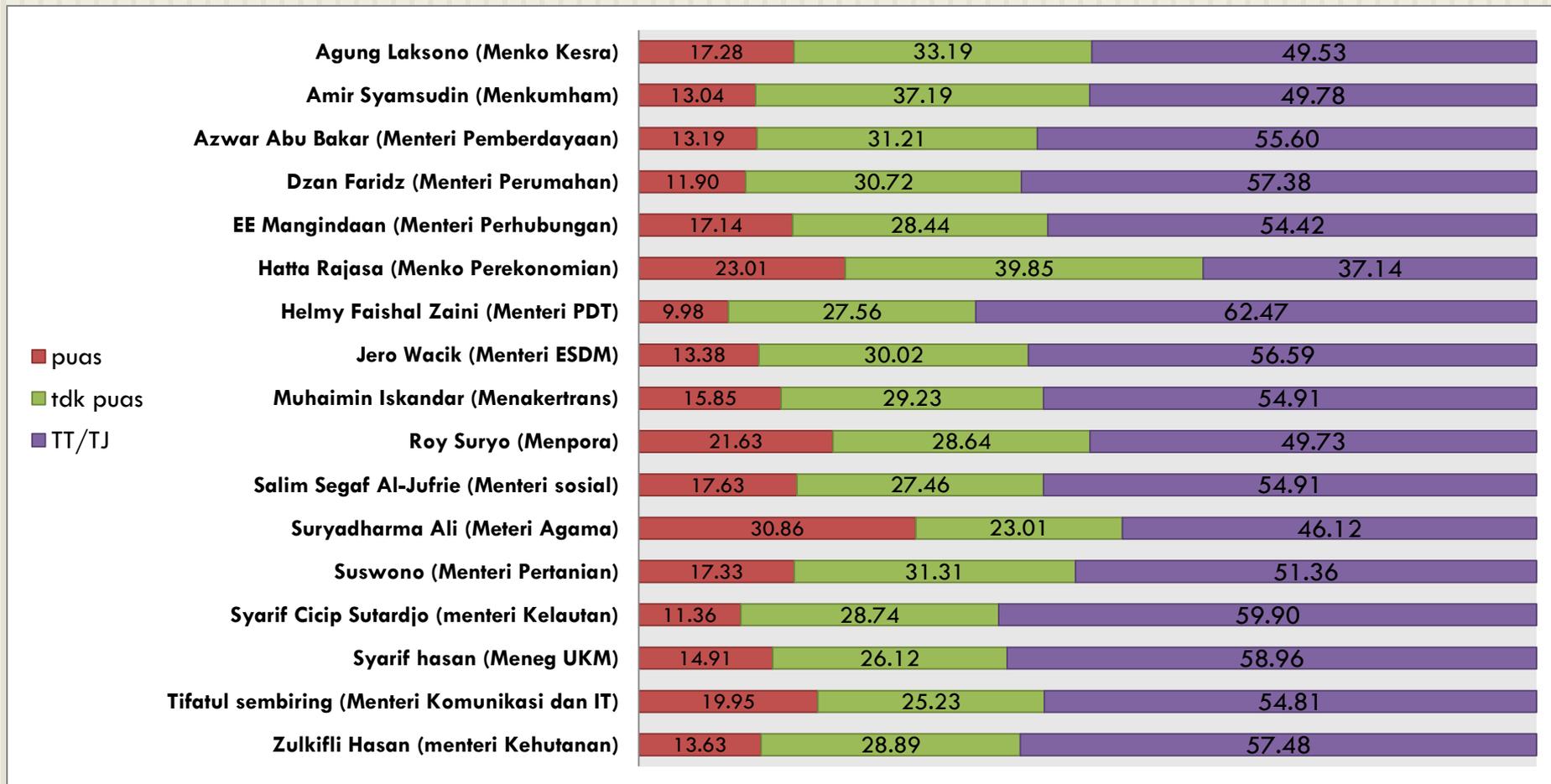
Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri dari Partai Politik



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAHAN SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

35



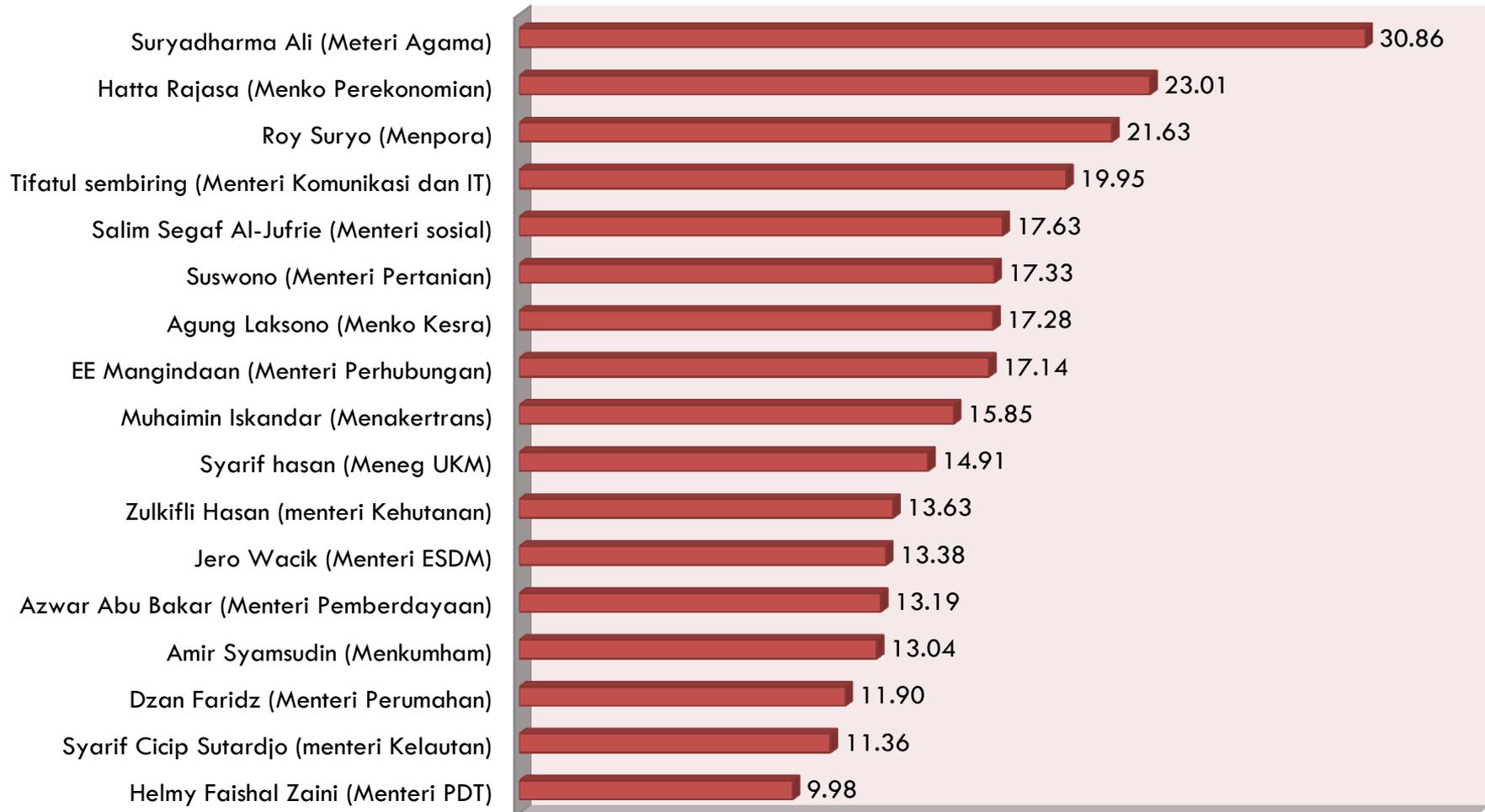
Peringkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Menteri dari Partai Politik



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
Pemerintahan SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Pol Tracking Institute

36



- Lepas dari peringkat kepuasan publik terhadap kinerja setiap menteri, angka persentase yang besar pada pilihan 'TT/TJ' atau 'Tidak Tahu/Tidak Jawab' menunjukkan bahwa banyak publik pemilih di Indonesia tidak mengetahui kinerja kementerian terkait di bawah menteri-menteri partai politik. Hal ini ditunjukkan dengan angka persentase 'TT/TJ' rata-rata di atas 50%.
- Dari temuan di atas, 3 menteri yang dianggap relatif baik kinerjanya dibanding menteri-menteri lainnya adalah Suryadarma Ali (30.86%), Hatta Radjasa (23.01), dan Roy Suryo (21.63). Sedangkan 3 menteri di 3 terbawah adalah Helmi Faishal Zaini (9.98%), Syarif Cicip Sitardjo (11.36), dan Djan Faridz (11.9%).
- Dengan indikator sebagai ketua umum partai, maka urutan tingkat kepuasan publik teratas kinerja menteri adalah Suryadarma Ali (PPP-30.86%), Hatta Rajasa (PAN-23.01%), Muhaimin Iskandar (PKB-15.85%), dan Syarief Hasan (14.91)
- Jika menggunakan indikator menteri yang menjadi caleg dalam Pemilu 2014, maka rata-rata tingkat kepuasan publik terhadap kinerja mereka berada dibawah 25%.
 - (1) Roy Suryo (Demokrat-21.63%)
 - (2) Tifatul Sembiring (PKS-19.95%)
 - (3) Suswono (PKS-17.33%)
 - (4) EE. Mangindaan (Demokrat-17.14%)
 - (5) Muhaimin Iskandar (PKB-15.85%)
 - (6) Syarief Hasan (Demokrat-14.91%)
 - (7) Zulkifli Hasan (PAN-13.63%)
 - (8) Jero Wacik (Demokrat-13.38%)
 - (9) Amir Syamsuddin (13.04%)
 - (10) Helmy Faishal Zaini (PKB-9.98%)



HASIL SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT **TERHADAP KINERJA DPR RI**

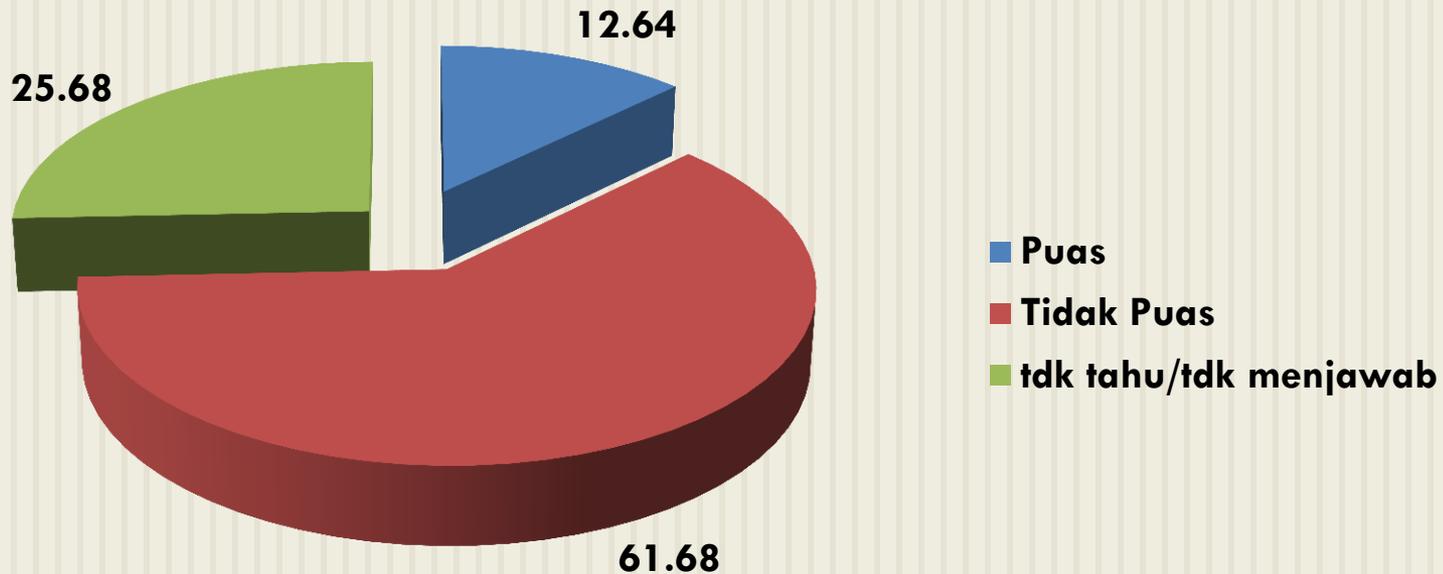
Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja DPR RI



HASIL SURVEI
STAGNASI KEPUASAN
PUBLIK TERHADAP KINERJA
Pemerintahan SBY-
BOEDIONO DAN KINERJA
DPR RI Periode 2009 -
2014

© Bel Tracking Institute

39



Survei ini menunjukkan hanya 12.64% masyarakat yang menjawab puas terhadap kinerja DPR RI periode 2009-2014. Sisanya ada 61,68% menyatakan tidak puas terhadap kinerja DPR RI. Sebanyak 25.68% menyatakan tidak tahu. Hal ini bisa dijelaskan dengan menelusuri riwayat tiga fungsi dewan: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.



PENUTUP

Kesimpulan



- Bila standar kecukupan atas kepuasan publik adalah: sangat buruk 0-25%, buruk 26-50%, baik 51-75%, dan sangat baik 76-100% maka raihan yang diperoleh pemerintah masuk dalam kategori buruk, yakni eksekutif 40%, dan legislatif (DPR) masuk kategori sangat buruk 12.64%.
- Artinya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah SBY-Boediono cenderung stagnan di angka 40%. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kepuasan publik di bawah 50% hampir di semua bidang kebijakan kecuali bidang pendidikan, dengan tingkat kepuasan terendah pada bidang ekonomi.
- Sementara jika kita memotret kementerian yang berasal dari partai pengusung koalisi KIB II, lebih dari setengah responden (lebih dari 50%) tidak mengetahui kinerja kementerian terkait. Artinya, persentase kepuasan publik hampir selalu lebih rendah dibandingkan angka ketidaktahuan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja kementerian dari partai politik.

Kesimpulan



- Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan SBY-Boediono itu bisa jadi disebabkan oleh ‘wajah ganda’ presiden dan para menterinya menjelang pemilu 2014 – yaitu peran ganda sebagai “pengurus negara” sekaligus “pengurus partai” – karena 19 kursi menteri atau 55% komposisi kabinet berasal dari Parpol. Dari 19 menteri itu, 4 di antaranya adalah ketua umum partai yakni, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat, termasuk Presiden Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ditambah lagi 10 menteri dari unsur partai yang turut maju sebagai calon anggota legislatif Pemilu 2014. Dengan posisi ganda itulah, konsentrasi para menteri termasuk presiden menjadi terpecah antara urusan partai dan urusan pemerintahan (negara).
- Rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah ini menjadi ujian kian berat bagi Pemerintahan SBY-Boediono menjelang Pemilu 2014, dimana para menteri dari parpol akan semakin terpecah fokusnya antara menuntaskan urusan pemerintahan dengan memenangkan partainya.
- Rendahnya penilaian publik terhadap kinerja DPR RI 2009-2014 (12,64%) disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas kinerja dan produk DPR RI di tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Hal ini diperburuk oleh tersangkutnya anggota dewan dalam kasus hukum seperti korupsi, skandal moral, dan komunikasi publik yang kurang etis di media.